

# Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

<sup>1</sup>Gusti Muhammad Hidayatullah, <sup>2</sup>Fakhri, <sup>3</sup>Muawanah

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Korespondensi : gustimh95@gmail.com

## Abstrak

*Program Sembako merupakan transformasi dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, kualitas, harga, dan administrasi bantuan pangan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sembilan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam tergolong cukup efektif. Hal ini terlihat dari ketepatan sasaran penerima manfaat dan kemampuan penyelenggara program yang dinilai cukup baik. Selain itu, kesesuaian hasil pelaksanaan program dengan tujuan program serta perhatian dan tindak lanjut dari pelaksana juga dinilai cukup efektif. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti data penerima yang belum diperbarui secara optimal, ketidaktepatan waktu penyaluran, kurangnya sosialisasi program, dan keterbatasan pendamping di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan koordinasi, komunikasi, pembaruan data penerima, dan intensitas sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Sembako di tingkat desa.*

**Kata kunci:** Efektivitas, Kebijakan Publik, Program Sembako.

## Abstract

*The Sembako Program is a transformation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) aimed at improving the accuracy of targeting, timing, quantity, quality, price, and administration of food assistance for the community. This research aims to analyze the effectiveness of the Sembako Program implementation in Karias Dalam Village, Banjang District, Hulu Sungai Utara Regency. The research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques were carried out thru interviews, observations, and documentation with nine informants selected using purposive sampling techniques. The research results indicate that the implementation of the Sembako Program in Karias Dalam Village is quite effective. This is evident from the accuracy of the target beneficiaries and the program organizers' capabilities, which are considered quite good. Additionally, the alignment of the program's implementation results with its objectives, as well as the attention and follow-up from the implementers, are also deemed quite effective. However, several obstacles were still found, such as the recipient data not being updated optimally, delays in distribution, lack of program socialization, and limited field assistants. This research shows that improved coordination, communication, updating of recipient data, and the intensity of socialization are necessary to enhance the effectiveness of the Sembako Program implementation at the village level.*

**Keyword:** Effectiveness, Public Policy, Basic Food Program

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian utama di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan pekerjaan yang layak. Kondisi tersebut

menyebabkan masyarakat miskin mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi persoalan multidimensional yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tingginya tingkat kemiskinan dapat berdampak pada meningkatnya kesenjangan sosial, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terhambatnya pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui kebijakan dan program perlindungan sosial. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerbitan berbagai regulasi dan program bantuan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan berbagai pihak guna mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah melakukan transformasi sistem bantuan pangan dari program subsidi beras bagi masyarakat miskin (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Transformasi ini dilakukan untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memilih bahan pangan sesuai kebutuhan.

Pada tahun 2020, pemerintah kembali mengembangkan program BPNT menjadi Program Sembako sebagai bentuk penguatan perlindungan sosial dan peningkatan efektivitas bantuan pangan. Program Sembako merupakan program bantuan sosial pangan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Melalui program ini, masyarakat penerima manfaat tidak hanya dapat membeli beras dan telur seperti pada program BPNT sebelumnya, tetapi juga berbagai bahan pangan lainnya yang mengandung sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat miskin.

Perkembangan Program Sembako juga ditandai dengan peningkatan jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Pada awal pelaksanaannya, nilai bantuan sebesar Rp110.000 per bulan per KPM, kemudian meningkat menjadi Rp150.000 dan selanjutnya menjadi Rp200.000 per bulan per KPM. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memperkuat program perlindungan sosial guna mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako, program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, memberikan bantuan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria kemiskinan dan masalah sosial, serta memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Meskipun demikian, pelaksanaan Program Sembako di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan yang sering muncul antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan penyaluran bantuan, kurang optimalnya sosialisasi program, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan bantuan. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan program belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan program menjadi hal penting yang perlu diperhatikan agar manfaat bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program. Pertama, pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat dinilai masih kurang optimal. Informasi mengenai mekanisme dan persyaratan program sebagian besar hanya disampaikan dari mulut ke mulut oleh aparat desa sehingga banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pelaksanaan Program Sembako. Kedua, penyaluran bantuan dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih terdapat masyarakat yang tidak memenuhi kriteria namun menerima bantuan, sementara masyarakat yang layak menerima justru tidak mendapatkan bantuan. Ketiga, proses penyaluran bantuan terkadang mengalami keterlambatan sehingga masyarakat harus menunggu cukup lama untuk menerima bantuan yang seharusnya disalurkan setiap bulan. Keempat, terdapat risiko penyalahgunaan bantuan oleh penerima manfaat untuk kepentingan lain di luar kebutuhan pangan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam masih memerlukan evaluasi agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Efektivitas suatu program sangat penting untuk diukur karena menunjukkan sejauh mana program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Ulber Silalahi, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dan mencapainya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, Edy Sutrisno menyatakan bahwa efektivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karakteristik organisasi, lingkungan, sumber daya manusia, dan kebijakan manajemen. Dalam konteks program bantuan sosial, efektivitas dapat dilihat dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program.

Penelitian mengenai efektivitas program bantuan sosial sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Fitriana dkk. (2022) mengenai efektivitas pelaksanaan penyaluran Beras Daerah (Rasda) di Desa Ampukung dan Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh keterlambatan penyaluran bantuan, kurang tepatnya sasaran penerima bantuan, serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap bantuan yang diterima. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aura Ziah Adinda dkk. (2021) mengenai efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh juga menunjukkan bahwa program belum berjalan efektif. Permasalahan yang ditemukan meliputi masih adanya masyarakat layak yang belum menerima bantuan, kesalahan data penerima, ketidakdisiplinan dalam proses penyaluran, dan kualitas bantuan yang kurang baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa efektivitas program bantuan sosial pangan masih menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Namun, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada program Rasda dan BPNT di daerah yang berbeda. Sementara itu, penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum banyak dilakukan. Selain itu, penelitian ini menggunakan indikator efektivitas program menurut Budiani yang meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Program Sembako di tingkat desa.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah, aparat desa, maupun pihak terkait lainnya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Sembako agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

## 2. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan Desa Karias Dalam sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu desa dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang cukup banyak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, berdasarkan observasi awal ditemukan beberapa permasalahan, seperti kurang optimalnya sosialisasi program, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan penyaluran bantuan, dan keterbatasan pendampingan kepada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga mampu memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan Program Sembako. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, laporan, dan arsip terkait pelaksanaan program. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 9 orang yang dianggap mengetahui pelaksanaan Program Sembako.

**Tabel Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara	1 Orang
2	Ketua TKSK Kecamatan Banjang	1 Orang
3	Kepala Desa Karias Dalam	1 Orang
4	Aparat Desa Karias Dalam	2 Orang
5	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	4 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>9 Orang</b>

Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut model Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Efektivitas program dianalisis menggunakan indikator Budiani, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memastikan data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan teori efektivitas program menurut Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017:3), efektivitas program dapat diukur melalui ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, pelaksanaan Program Sembako dinilai cukup efektif meskipun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

## 1. Ketepatan Sasaran Program

### a. Tepat Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ketepatan sasaran dalam pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam dinilai cukup efektif. Sebagian besar penerima manfaat telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah, yaitu masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun demikian, masih ditemukan beberapa penerima bantuan yang dianggap tidak layak menerima bantuan, sementara masyarakat yang lebih membutuhkan justru belum terdaftar sebagai penerima manfaat.

*“Sebagian besar penerima bantuan memang masyarakat yang membutuhkan, tetapi masih ada data lama yang belum diperbarui sehingga ada warga yang ekonominya sudah membaik tetapi masih menerima bantuan.” (Kepala Desa Karias Dalam)*

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu masyarakat penerima manfaat:

*“Ada warga yang sebenarnya mampu tapi masih dapat bantuan, sedangkan yang lebih susah malah belum masuk daftar penerima.” (Informan KPM)*

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena proses pembaruan data penerima manfaat belum dilakukan secara optimal dan masih bergantung pada data DTKS dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran program belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat di lapangan dengan data penerima bantuan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rina Fitriana dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial masih menghadapi kendala berupa ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Secara kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa validitas data penerima bantuan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program. Apabila data penerima tidak diperbarui secara berkala, maka program bantuan sosial berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data secara berkala melalui koordinasi antara pemerintah desa, Dinas Sosial, dan pihak pendamping agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

### b. Peserta Program

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peserta Program Sembako di Desa Karias Dalam dinilai cukup efektif. Penetapan peserta program dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat melalui data DTKS. Namun, sebagian masyarakat masih kurang memahami proses penetapan peserta program sehingga muncul pertanyaan terkait alasan seseorang menerima atau tidak menerima bantuan.

Ketua TKSK Kecamatan Banjang menyampaikan:

*“Penetapan penerima bantuan itu berdasarkan data dari pusat, jadi desa hanya membantu melakukan pendataan dan usulan.” (Ketua TKSK Kecamatan Banjang)*

Sementara itu, salah satu penerima manfaat menyatakan:

*“Kami hanya diberi tahu kalau dapat bantuan, tapi tidak tahu bagaimana proses penetapannya.” (Informan KPM)*

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penetapan penerima bantuan menunjukkan bahwa komunikasi antara penyelenggara program dan masyarakat masih belum optimal. Hal ini dapat menyebabkan munculnya persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang merasa layak menerima bantuan namun tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017:3) yang menyatakan bahwa ketepatan dalam menentukan peserta program sangat memengaruhi keberhasilan program. Dengan demikian, penyelenggara program perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka

dan transparan mengenai mekanisme penetapan penerima bantuan agar masyarakat dapat memahami proses pelaksanaan program secara lebih baik.

## 2. Sosialisasi Program

### a. Kemampuan Penyelenggara Program

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kemampuan penyelenggara program dinilai cukup efektif. Aparat desa dan pendamping program dinilai telah memiliki kemampuan dasar dalam melaksanakan Program Sembako, seperti melakukan pendataan, penyaluran informasi, dan pendampingan kepada masyarakat. Namun, masih diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif.

Salah satu aparat desa menyampaikan:

*“Kami sudah berusaha menjalankan program sesuai aturan, tetapi memang masih perlu pelatihan lagi supaya lebih memahami mekanisme program.” (Aparat Desa)*

Hal serupa juga disampaikan oleh pihak TKSK:

*“Pelatihan biasanya hanya diberikan kepada pihak tertentu, jadi belum semua pelaksana mendapat pembekalan secara menyeluruh.” (Ketua TKSK Kecamatan Banjang)*

Berdasarkan observasi peneliti, keterbatasan pelatihan menyebabkan sebagian pelaksana program belum sepenuhnya memahami prosedur teknis pelaksanaan Program Sembako. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia pelaksana program. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat desa dan pendamping program menjadi hal penting agar pelaksanaan Program Sembako dapat berjalan lebih efektif.

### b. Informasi Program

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, informasi mengenai Program Sembako dinilai kurang efektif. Sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai tujuan, mekanisme, dan penggunaan bantuan.

Salah satu masyarakat penerima manfaat menyampaikan:

*“Informasi yang kami terima kadang hanya dari tetangga atau aparat desa, jadi masih banyak yang kurang paham.” (Informan KPM)*

Selain itu, aparat desa juga menyampaikan:

*“Sosialisasi memang ada, tetapi belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada semua masyarakat.” (Aparat Desa)*

Temuan ini menunjukkan bahwa metode penyampaian informasi masih belum efektif dan belum menjangkau seluruh masyarakat penerima manfaat. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Aura Ziah Adinda dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa kurang optimalnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program bantuan sosial.

Secara kritis, lemahnya sosialisasi dapat menyebabkan kesalahan pemahaman masyarakat terhadap tujuan program dan meningkatkan potensi terjadinya konflik sosial akibat kurangnya transparansi informasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih terstruktur, terbuka, dan berkelanjutan melalui pertemuan langsung maupun media informasi desa.

## 3. Tujuan Program

### a. Kesesuaian Antara Hasil Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Program Sembako dinilai cukup efektif dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Salah satu penerima manfaat menyampaikan:

*“Bantuan ini sangat membantu untuk membeli kebutuhan dapur sehari-hari.” (Informan KPM)*

Namun demikian, masih ditemukan adanya penggunaan bantuan untuk kebutuhan lain di luar pangan.

*“Kadang bantuan dipakai juga untuk kebutuhan sekolah anak atau bayar listrik karena kebutuhan keluarga banyak.” (Informan KPM)*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan program belum sepenuhnya tercapai karena bantuan yang seharusnya difokuskan untuk kebutuhan pangan masih digunakan untuk kebutuhan lain. Secara kritis, hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah memengaruhi pola penggunaan bantuan sehingga pengawasan dan edukasi terkait penggunaan bantuan perlu diperkuat.

#### b. Pemahaman Terhadap Program

Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman masyarakat terhadap Program Sembako dinilai cukup efektif, namun masih terdapat masyarakat yang belum memahami tujuan dan mekanisme program secara menyeluruh.

*“Kami sudah menjelaskan melalui rapat desa, tetapi memang masih ada masyarakat yang belum memahami sepenuhnya.” (Kepala Desa Karias Dalam)*

Kurangnya pemahaman masyarakat menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam pelaksanaan program belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.

### 4. Pemantauan Program

#### a. Perhatian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, perhatian dari penyelenggara program dinilai cukup efektif karena aparat desa dan pendamping masih melakukan pemantauan terhadap masyarakat penerima bantuan.

Salah satu informan menyampaikan:

*“Petugas kadang menanyakan apakah bantuan sudah diterima atau belum.” (Informan KPM)*

Namun, masyarakat juga mengeluhkan kurangnya informasi ketika terjadi keterlambatan penyaluran bantuan.

*“Kalau bantuan terlambat, kami hanya disuruh menunggu tanpa penjelasan yang jelas.” (Informan KPM)*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi informasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan kepastian terkait proses penyaluran bantuan.

#### b. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil wawancara, tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat dinilai cukup efektif, namun belum berjalan maksimal.

Salah satu aparat desa menyampaikan:

*“Kalau ada keluhan biasanya kami sampaikan ke pihak terkait, tetapi proses tindak lanjutnya kadang memerlukan waktu.” (Aparat Desa)*

Selain itu, peneliti menemukan bahwa belum terdapat mekanisme pengaduan resmi yang mudah diakses masyarakat. Akibatnya, masyarakat hanya menyampaikan keluhan melalui aparat desa. Secara kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pengaduan masyarakat masih lemah sehingga perlu adanya mekanisme pengaduan yang lebih jelas dan responsif.

Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara Dinas Sosial, TKSK, dan pemerintah desa dalam melakukan pembaruan data penerima manfaat secara berkala

agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sosialisasi program melalui penyampaian informasi yang lebih jelas, terbuka, dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dan mekanisme Program Sembako dengan baik.

Adapun rekomendasi implementatif yang dapat dilakukan yaitu melakukan verifikasi dan validasi data DTKS secara rutin, meningkatkan sosialisasi program melalui pertemuan langsung maupun media informasi desa, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaksana program, membentuk mekanisme pengaduan masyarakat yang jelas dan mudah diakses, serta meningkatkan transparansi informasi terkait jadwal dan proses penyaluran bantuan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Faktor Yang Menghambat Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Faktor penghambat adalah semua jenis faktor yang sifatnya menghambat (menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Adapun faktor-faktor yang menghambat Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut.

### **1. Verifikasi Data Yang Kurang *Updatel***

Proses verifikasi data merupakan tahapan kunci untuk memastikan ketepatan sasaran program Sembako pada Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Verifikasi dilakukan untuk menilai apakah calon penerima manfaat benar-benar termasuk dalam kriteria penerima manfaat program Sembako berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah faktor yang menghambat pelaksanaan verifikasi data sehingga mempengaruhi ketepatan sasaran dan efektivitas program. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Karias Dalam ditemukan bahwa salah satu hambatan dalam proses verifikasi data adalah penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan untuk daftar penerima. DTKS seringkali tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini. Banyak desa melaporkan bahwa masih terdapat warga yang sesungguhnya sudah mampu akan tetapi tetap terdaftar sebagai penerima, sementara warga yang benar-benar memiliki ekonomi yang rendah namun belum masuk DTKS.

### **2. Ketepatan (Guna dan Waktu)**

Ketepatan (guna dan waktu) merupakan indikator penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program sembako. Ketepatan guna berarti bantuan digunakan sesuai dengan tujuan program yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran terlebih dalam memenuhi kebutuhan pangan serta ketepatan waktu berkaitan dengan kelancaran pencairan bantuan agar KPM dapat memenuhi kebutuhan pokok secara rutin setiap bulan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di Desa Karias Dalam terdapat sejumlah faktor penghambat dalam ketepatan (guna dan waktu), yaitu dalam proses pencairan yang terkadang waktunya bisa cepat atau lambat karena berbagai masalah dari pusat. Program ini diberikan kepada keluarga yang sangat membutuhkan supaya perekonomiannya terbantu. Terdapat pula peserta yang menyampaikan bahwa manfaat program belum sepenuhnya efektif.

### **3. Sosialisasi Yang Kurang Intensif**

Sosialisasi merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan keberhasilan dalam melaksanakan program sembako. Sosialisasi yang baik memastikan bahwa KPM memahami informasi mengenai tujuan program, mekanisme penyaluran, hak dan kewajiban KPM, prosedur pengaduan jika terjadi masalah serta perubahan kebijakan yang berlaku. Namun

kelnjatannya, kegiatan sosialisasi masih menghadapi beberapa kendala yang membuat efektivitas pelaksanaan program tidak efektif. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sosialisasi tidak pernah dilakukan secara formal melalui pertemuan khusus atau pertemuan resmi. Tidak ada jadwal bulanan atau mekanisme sosialisasi berkala yang ditetapkan oleh dinas maupun pemerintah desa. Sebagian besar informasi disampaikan secara informal baik melalui percakapan singkat saat pembagian bantuan atau bahkan dari mulut ke mulut antar warga.

#### 4. Keterbatasan Tenaga Pendamping di Lapangan

Pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya penyimpangan, mendeteksi permasalahan sejak awal serta memastikan bahwa bantuan yang dibelikan pemerintah daerah sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan program Sembako di Desa Karias Dalam masih menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satu faktor yang menghambat pengawasan adalah keterbatasan tenaga pendamping di lapangan. TKSK yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di wilayah tersebut tidak hanya menangani satu desa, tetapi mencakup beberapa desa sekaligus. Dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah KPM yang banyak sehingga pendamping tidak mampu melakukan pengawasan secara intensif dan terjadwal. TKSK menyampaikan bahwa mereka harus membagi waktu antara monitoring, pendataan, koordinasi dengan dinas, menghadiri rapat serta melakukan pendampingan sosial untuk program lain. Kondisi ini menyebabkan pengawasan program Sembako tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.

### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas pelaksanaan Program Sembako di Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, pelaksanaan program dinilai cukup efektif. Hal ini terlihat dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program yang sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut meliputi masih adanya penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program, sosialisasi yang belum optimal, keterlambatan penyaluran bantuan, serta kurangnya transparansi informasi dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat. Faktor penghambat efektivitas pelaksanaan Program Sembako meliputi verifikasi data yang belum diperbarui secara optimal, ketepatan penggunaan dan waktu penyaluran bantuan, kurang intensifnya sosialisasi program, serta keterbatasan tenaga pendamping di lapangan.

### 5. SARAN

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara Dinas Sosial, TKSK, dan pemerintah desa dalam pembaruan data penerima manfaat, peningkatan sosialisasi program, serta penguatan kapasitas pendamping program agar pelaksanaan Program Sembako lebih tepat sasaran dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi program, melakukan pembaruan data DTKS secara berkala, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta memperkuat pendampingan agar pelaksanaan Program Sembako berjalan lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim, (2023). Pelraturan Melntelri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Telntang *Pellaksanaan Program Selmblako*.
- [2] Anomim, (2010). Pelraturan Prelsideln Relpubllik Indonelsia Nomor 15 Tahun 2010. Telntang *Pelrcelpatan Pelnanggulangan Kelmiskinan*.
- [3] Anonim, (2017). Pelraturan Prelsideln Relpubllik Indonelsia Nomor 63 Tahun 2017 Telntang *Pelnyaluran BLantuan Pangan Non Tunai*.
- [4] Aura Ziah Adinda. (2021). *ELfelktivitas Pellaksanaan Program BLantuan Pangan Non Tunai (BLPNT) Di Gampong Selutui Kelcamatan BLaiturrahman Kota BLanda Acelh*. UIN Ar-Raniry.
- [5] Pratiwi, M., & Nurcahyanto, H. (2017). *ELfelktivitas program BLPJS kelselhatan di kota Selmarang (studi kasus pada pasieln pelngguna jasa BLPJS kelselhatan di puskelsmas Srongol)*. Journal of Public Policy and Managemelnt Relvielw, 6(2), 416-430.
- [6] Rina Fitriana. (2022). *ELfelktivitas Pellaksanaan Pelnyaluran BLEltras Daelrah (Rasda) di Delsa Ampukung dan Tellaga Itar Kelcamatan Kellua Kablupatel Tablalong*. Skripsi STIA Amuntai.
- [7] Silalahi, Ulblar 2014. *Asas-Asas Manajelmeln*. BLandung: Relfika Aditama.
- [8] Sutrisno, Edy (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.